

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN
TAHUN 2024
KEPADA BUPATI GUNUNGKIDUL



KALURAHAN BEJI
KAPANEWON NGAWEN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat-Nya, sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan, Kalurahan Beji Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 dapat diselesaikan. Sebab sebagai perwujudan dari pertanggungjawaban Lurah dalam menjalankan roda Pemerintahan Kalurahan selama 1 (Satu) tahun, Lurah harus menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan kepada Bupati yang disampaikan melalui Panewu. Selama Lurah menjabat telah melakukan berbagai kegiatan yang timbul sebagai bentuk dari penggunaan dan pengelolaan keuangan Kalurahan yang anggarannya didapatkan dari pemerintah baik pusat maupun daerah yang harus dipertanggungjawabkan baik secara moral kepada masyarakat Kalurahan maupun secara kedinasan kepada atasannya.

Lurah dalam mengelola keuangan Kalurahan telah menggunakan anggaran baik dari pemerintah pusat maupun daerah untuk berbagai bidang kegiatan yang terdiri dari bidang penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan, bidang pembangunan Kalurahan, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang penanggulangan bencana, keadaan mendesak dan darurat. Lurah telah memberikan kemampuan terbaik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kalurahan Beji dan melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan oleh pemerintahan di atasnya secara sungguh-sungguh. Namun perlu disadari bahwa tiada hal yang sempurna selain Tuhan Yang Maha Esa. Demikian juga dengan Lurah yang meskipun telah berupaya sekuat pikiran dan tenaga namun masih ada saja kekurangan dan kesalahan. Maka, pembinaan dan bimbingan dari pihak-pihak terkaitpun masih sangat diharapkan untuk dapat memperbaiki kegiatan-kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab Lurah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengontrolan dan pelaporannya.

Dengan ini Lurah menyampaikan pertanggungjawaban atas segala kegiatan penggunaan dan pengelolaan keuangan di Kalurahan Beji selama 1 tahun melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan Lurah Beji tahun 2023. Kami menyadari laporan pertanggungjawaban yang kami sampaikan masih jauh dari sempurna, untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran sehingga kami dapat melakukan perbaikan di waktu mendatang. Harapan kami, dengan selesainya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 ini masyarakat dan pemerintah daerah dapat mengambil manfaatnya.

Beji, Maret 2025
Lurah Beji

TTD

Sri Idhayanti

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2024 KEPADA BUPATI GUNUNGKIDUL

BAB I PENDAHULUAN

A. Tujuan Penyusunan Laporan

Adapun tujuan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan tahun 2024 adalah sebagai berikut.

1. Menyampaikan Pelaksanaan Pemerintahan Kalurahan baik bidang pemerintahan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang penanggulangan bencana, keadaan mendesak dan darurat selama tahun 2024.
2. Menjelaskan kepada Bupati dalam melaksanakan pemerintahan kalurahan tahun 2024 dengan bersih dan transparan.
3. Menjelaskan kepada Panewu, Bamuskal dan pihak-pihak yang terkait dalam melaksanakan pemerintahan kalurahan tahun 2024 dengan bersih dan transparan.
4. Sebagai Laporan Akhir dari Lurah selama 1 tahun menjabat Lurah di tahun 2024.

B. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan

Undang - Undang Nomor 06 Tahun 2014 sangat memberikan peluang bagi Pemerintah Kalurahan untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas Kalurahan dengan mengedepankan kepentingan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implementasi dari paradigma tersebut juga mensyaratkan perlunya penerapan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintah lainnya. Akuntabilitas publik merupakan landasan bagi proses penyelenggaraan pemerintahan yang diperlukan karena aparatur pemerintah harus mempertanggungjawabkan tindakan dan pekerjaannya, baik kepada publik maupun kepada lembaga dimana dia bekerja. Dengan akuntabilitas publik setiap aparat harus dapat menyajikan informasi yang benar dan lengkap untuk menilai kinerjanya, baik yang dilakukan oleh masyarakat, instansi kerjanya, kelompok pengguna pelayanannya maupun profesinya. Tujuannya adalah untuk menjelaskan bagaimanakah pertanggungjawaban hendak dilaksanakan dan bagaimana realitas pelaksanaannya dan apa dampaknya.

Oleh karenanya, sebagai salah perwujudan akuntabilitas, sekaligus pelaksanaan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka pada akhir jabatannya Lurah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, termasuk kepada pemerintah yang lebih tinggi melalui Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan (LKPPKalurahan).

Secara yuridis formal, penyampaian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan telah diamanatkan dalam ketentuan Pasal 27 huruf (b) Undang - Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa.

Pemerintah Daerah mengharuskan pada pemerintah kalurahan agar melakukan pelaporan penggunaan dan pengelolaan keuangan kalurahan yang dilaksanakannya. Pelaporan tersebut selain berguna sebagai pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterimanya juga berfungsi sebagai bahan kontrol dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kalurahan. Evaluasi dilakukan terhadap kegiatan mulai dari perencanaan tahunan Kalurahan yang tertuang dalam Rencana Kegiatan Pemerintah Kalurahan (RKPKalurahan) maupun perencanaan jangka menengah 6 (enam) tahunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) terhadap konsistensi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dan pelaporan atau pertanggungjawaban kegiatan melalui Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan (LPJ). Dari evaluasi yang dilakukan tersebut akan didapatkan data tentang keunggulan maupun kelemahan dari suatu program atau kegiatan, keberhasilan maupun kekurangan dari suatu pelaksanaan kegiatan. Data yang dihasilkan tersebut dapat digunakan untuk melakukan perbaikan-perbaikan akan program kebijakan yang sudah dan akan dilakukan selanjutnya. Dengan perbaikan-perbaikan tersebut diharapkan nantinya visi Kalurahan Beji dapat tercapai. Adapun visi Kalurahan Beji adalah sebagai berikut:

“Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Prima Dalam Pemerintahan Yang Baik Menuju Masyarakat Desa Beji Yang Maju, Mandiri, Aman Dan Sejahtera”

Kemudian untuk lebih menguatkan Visi, Lurah Beji mengangkat sebuah slogan yaitu :

Bersama Rakyat, Beji Kuat !!!

Dengan slogan ini diharapkan semua elemen baik Pemerintah Kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (BPD, LPMD, PKK, Karang Taruna, RT/RW) Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat Budaya dan seluruh Lapisan masyarakat, secara bersama – sama membangun Desa Beji. Sehingga Desa Beji akan menjadi Desa yang Kuat dari semua sisi baik Infrastruktur, Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Kuat dalam adat dan Budaya, Kuat dalam Kepemudaan, serta yang terdepan adalah kuat dalam ketaqwaan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Adapun Misi Desa Beji adalah sebagai berikut.

1. Bidang Pemerintahan

- a) Meningkatkan SDM aparatur Desa,
- b) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang lebih baik,
- c) Memberdayakan kelembagaan masyarakat,

- d) Memberdayakan LINMAS Desa,
- e) Sertifikasi Tanah dan,
- f) Meningkatkan ketertiban, keamanan serta pengendalian dan pengawasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

2. Bidang Pembangunan

- a) Meningkatkan sarana dan prasarana umum
- b) Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian
- c) Meningkatkan sarana dan prasarana Transportasi
- d) Memberdayakan dan meningkatkan swadaya masyarakat
- e) Memanfaatkan sumberdaya alam dan pemanfaatannya
- f) Memelihara sarana dan prasarana keamanan
- g) Memelihara dan meningkatkan sarana peribadahan
- h) Memelihara sarana dan prasarana pendidikan
- i) Meningkatkan pemanfaatan lahan pekarangan

3. Bidang Kemasyarakatan

- a) Membina kerukunan umat beragama
- b) Memelihara dan meningkatkan kemakmuran tempat ibadah
- c) Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pembinaan usaha kecil dan pembinaan masyarakat untuk sadar wisata dan menjadikan potensi wisata sebagai sarana untuk meningkatkan perekonomian
- d) Meningkatkan kecerdasan warga dan memberantas ketertinggalan
- e) Memberdayakan dan memelihara hidup gotong royong
- f) Memberdayakan lembaga kemasyarakatan Desa
- g) Memberdayakan dan pembinaan karang taruna
- h) Pembinaan terhadap pendidikan anak dan remaja
- i) Melestarikan budaya dan kesenian daerah
- j) Mengadakan pelatihan-pelatihan ketrampilan siap menghadapi dunia kerja
- k) Mengembangkan BUMDesa serta penguatan permodalan BUMDesa dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang ada dapat dioptimalisasikan sektor pertanian baik tahap produksi maupun tahap pengolahan hasilnya.
- l) Mengoptimalkan sektor pertanian, baik pada tahap produksi maupun tahap pengelolaan hasil
- m) Dari bidang Pemerintahan, bidang pembangunan, bidang kemasyarakatan tersebut terangkum misi Desa Beji, yaitu ;
- n) Mewujudkan masyarakat yang tertib, guyup rukun dalam kehidupan bermasyarakat, yang mengedepankan sinergitas prinsip-prinsip keagamaan, budaya dan adat istiadat yang ada, masyarakat yang berpengetahuan dan terampil yang mampu

melaksanakan pembangunan di Desa Beji melalui pemberdayaan dan pelatihan – pelatihan.

- o) Menyediakan dan memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan serta berkeadilan.
- p) Menjalankan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik, Jujur dan Transparan.
- q) Mewujudkan Desa Beji Sebagai Desa Budaya Dengan Mengedepankan Nilai-nilai Kearifan Lokal Sebagai Daya Tarik Potensi Wisata.
- r) Pelaksanaan Pembangunan Desa Yang Berkesinambungan untuk mewujudkan Desa Beji sebagai Desa Wisata dan Destinasi Tujuan Wisata.
- s) Meningkatkan pelayanan Administrasi, pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan dan karang taruna.
- t) Mengembangkan BUMDesa serta penguatan modal BUMDesa dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang ada.
- u) Mengoptimalakan sektor pertanian dan industri rumah tangga baik tahap produksi maupun tahap pengolahan hasilnya.

C. Strategi dan Kebijakan

Strategi pembangunan desa merupakan upaya untuk merealisasikan program pembangunan desa. Adapun strategi tersebut dalam pencapaian pembangunan desa adalah tindakan strategis yang bersifat internal dan eksternal, yakni :

1. Strategi internal

Strategi internal dalam pelaksanaan program pembangunan desa meliputi:

- a) Mewujudkan Integritas Perangkat Desa melalui penyepakatan dan penandatanganan Pakta Integritas. Hal ini untuk menjadi sebuah landasan atau pondasi untuk membangun kapasitas Pemerintahan Desa dan ditujukan untuk:
 - 1) Memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
 - 2) Menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran, serta memperlancar pelaksanaan tugas perangkat Desa agar lebih berkualitas, efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka mewujudkan pemerintah Desa dan warga masyarakat yang maju, mandiri, bertanggungjawab, dan bermartabat dengan dilandasi oleh nilai-nilai luhur budaya bangsa, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila;
- b) Meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa (PADesa) melalui pendayagunaan potensi dan aset-aset desa yang selama ini belum dikelola secara maksimal, terutama untuk mengembangkan sektor pariwisata, menuju Beji sebagai Desa Wisata sekaligus Desa Budaya.

- c) Mendorong peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakat dalam setiap pembangunan yang ditujukan utamanya kepada rumah tangga sejahtera.
- d) Penataan manajemen perencanaan pembangunan melalui pemilahan target pembangunan supradesa dan infradesa. Artinya target pembangunan yang menjadi wilayah SKPD kabupaten maupun provinsi seperti jalan kabupaten dan provinsi beserta bangunan pelengkapannya, maka leading sektornya diserahkan kepada kabupaten melalui musrenbang kecamatan, forum SKPD maupun musrenbang kabupaten dan seterusnya. Sedangkan sumber pembiayaan di wilayah Desa maka kepala desa menjadi penanggung jawab dalam pelaksanaannya seperti ADD dan Dana Desa, maka dialokasikan untuk membiayai target pembangunan yang menjadi tanggung jawab desa seperti jalan lingkungan desa beserta bangunan pelengkapannya.
- e) Meningkatkan kesadaran, rutinitas dan daya tawar politis masyarakat dalam pengelolaan pembangunan. Hal ini dilakukan agar RPJM Desa yang telah disusun melalui pendekatan partisipatif ini menjadi media pemberdayaan masyarakat agar masyarakat desa semakin diperhitungkan di hadapan para stake holder.

2. Strategi eksternal

Strategi eksternal dalam pencapaian program pembangunan desa antara lain ;

- a) Melakukan pengawalan terhadap kebijakan pembangunan desa yang dituangkan dalam RPJM Desa pada forum musrenbang dan forum-forum SKPD.
- b) Membangun kerjasama antardesa untuk mendorong pemerintah daerah melakukan reorientasi kebijakan dalam memperkuat pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat.
- c) Mendorong DPRD agar pro rakyat dan membentuk peraturan perundangan daerah yang mendukung pembangunan partisipatif. Hal ini untuk memberikan pedoman dan arah bagi SKPD untuk mensinergikan dan menyelaraskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan perencanaan pembangunan melalui RPJM Desa.
- d) Mendorong fungsi DPRD di dapil setempat sebagai wakil rakyat dalam mengakomodasi aspirasi RPJM Desa melalui haering dan jaring aspirasi yang sekaligus menjadi pertanggungjawaban wakil rakyat kepada para konstituennya di daerah pemilihan. Apabila anggota dewan yang bersangkutan tidak mampu memperjuangkan RPJM Desa, maka masyarakat akan memberikan sanksi politis pada pemilu berikutnya.
- e) Membangun kemitraan dengan pihak ketiga dalam mewujudkan capaian program. Kemitraan tersebut kerjasama dengan dunia usaha dalam bidang

pertanian, atau bentuk lain dari partisipasi dunia usaha dalam menjalankan tanggungjawab sosialnya.

Strategi internal dan eksternal tersebut diharapkan mampu mencapai indikator program selama 6 tahun ke depan dimana setiap tahun akan dievaluasi secara bertahap dengan mempertimbangkan masalah dan kondisi darurat pada setiap tahun anggaran.

Seluruh kegiatan pembangunan beserta capaian tujuan akan senantiasa dievaluasi secara rutin serta melibatkan masyarakat (partisipatif). Pemantauan, evaluasi dan pertanggungjawaban dimaksud dilaksanakan dengan pendekatan sebagai berikut :

- a) Mengevaluasi proses pelaksanaan kegiatan baik fisik, biaya maupun administrasi
- b) Mengevaluasi capaian kegiatan secara fisik (volume dan kualitas)
- c) Mengevaluasi capaian sasaran dan dampak
- d) Mengevaluasi pelestarian dan keberlanjutan kegiatan

Sedangkan bentuk pemantauan dan evaluasi yang dapat diterapkan nantinya, adalah sebagai berikut :

- a) Pemantauan bersama oleh masyarakat dan BPD
- b) Musyawarah Pertanggungjawaban oleh setiap lembaga berdasarkan program dan pelaksanaannya
- c) Musyawarah evaluasi dan pertanggungjawaban terhadap capaian-capaian kegiatan RPJM Desa, dilakukan rutin setiap tahun bersamaan dengan Musrenbangdes.
- d) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa dalam setiap akhir tahun anggaran.

BAB II
PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
KALURAHAN

A. Gambaran Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan

| No. | Sub Bidang | Kegiatan | Banyaknya/Jumlah | |
|----------|------------------------------|--|------------------|----------|
| | | | 2023 | 2024 |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>5</i> | <i>5</i> |
| 1. | Peraturan Perundang-undangan | a. Peraturan Kalurahan | 5 | 4 |
| | | b. Peraturan Bersama Lurah | 0 | 2 |
| | | c. Peraturan Lurah | 4 | 27 |
| | | d. Keputusan Lurah | 67 | 51 |
| 2. | Kependudukan | a. Jumlah Penduduk | | |
| | | 1) Laki-laki | 2.166 | 2.161 |
| | | 2) Perempuan | 2.172 | 2.205 |
| | | 3) Jumlah Kepala Keluarga | 1.550 | 1.584 |
| | | 4) Jumlah Jiwa | 4.338 | 4.366 |
| | | b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan: | | |
| | | 1) Tidak Sekolah/Belum Sekolah | 1.662 | 1.649 |
| | | 2) Tidak Tamat SD | 635 | 613 |
| | | 3) Tamat SD | 456 | 455 |
| | | 4) Tamat SMP | 670 | 664 |
| | | 5) Tamat SMA | 774 | 839 |
| | | 6) DI/DII | 13 | 12 |
| | | 7) DIII | 19 | 21 |
| | | 8) S-1 | 107 | 110 |
| 9) S-2 | 2 | 3 | | |
| 10) S-3 | 0 | 0 | | |
| | | | | |
| | | c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian: | | |
| | | 1) Petani/Buruh Tani | 1266 | 1352 |
| | | 2) Wiraswasta | 131 | 136 |
| | | 3) Buruh Harian Lepas | 338 | 366 |
| | | 4) Karyawan Swasta | 288 | 287 |

| | | | | |
|----|--|------------------------------|----------|----------|
| | | 5) PNS | 33 | 31 |
| | | 6) Pensiunan | 22 | 26 |
| | | 7) Mengurus Rumah Tangga | 471 | 508 |
| | | 8) Perangkat Desa | 24 | 25 |
| | | 9) Tidak Bekerja | 990 | 646 |
| | | 10) Lainnya | 0 | 0 |
| | | 11) Tentara | 2 | 2 |
| | | 12) Kepolisian RI | 2 | 2 |
| | | 13) Perdagangan/Pedagang | 45 | 45 |
| | | 14) Peternak | 5 | 5 |
| | | 15) Karyawan BUMN | 5 | 5 |
| | | 16) Karyawan BUMD | 2 | 2 |
| | | 17) Karyawan Honorer | 12 | 12 |
| | | 18) Pelajar/Mahasiswa | 224 | 224 |
| | | 19) Buruh Peternakan | 1 | 1 |
| | | 20) Pembantu Rumah Tangga | 10 | 10 |
| | | 21) Tukang Batu | 7 | 7 |
| | | 22) Tukang Gas/Pandai Besi | 1 | 1 |
| | | 23) Tukang Jahit | 3 | 3 |
| | | 24) Penata Rambut | 1 | 1 |
| | | 25) Mekanik | 3 | 3 |
| | | 26) Anggota DPRD Kabupaten | 1 | 1 |
| | | 27) Dosen | 1 | 1 |
| | | 28) Guru | 12 | 12 |
| | | 29) Bidan | 1 | 1 |
| | | 30) Perawat | 1 | 1 |
| | | 31) Sopir | 8 | 8 |
| 3. | | a. Status Tanah: | | |
| | | 1) Sertifikat Hak Milik | 2.706 | 2.706 |
| | | 2) Sertifikat Hak Guna Usaha | 0 | 0 |
| | | 3) Sertifikat Hak Pakai | 0 | 0 |
| | | b. Luas Tanah: | | |
| | | 1) Bersertifikat | 2.706 | 2.706 |
| | | 2) Belum Bersertifikat | 701 | 701 |
| | | 3) Tanah Kas Kalurahan | 406.127 | 406.127 |
| | | c. Peruntukan: | | |
| | | 1) Jalan (Ha) | 15,1500 | 15,1500 |
| | | 2) Tanah Ladang (Ha) | 411,2158 | 411,2158 |

| | | | | |
|----|--------------------------------------|---|----------|----------|
| | | 3) Bangunan Umum (Ha) | 1,1740 | 1,1740 |
| | | 4) Perumahan (Ha) | 188,1705 | 188,1705 |
| | | 5) Ruang Fasilitas Umum (Ha) | 60,8071 | 60,8071 |
| | | d. Tanah yang Belum Dikelola | | |
| | | 1) Hutan (Ha) | 25,0000 | 25,0000 |
| | | 2) Rawa-rawa (Ha) | 0 | 0 |
| 4. | Manajemen Pemerintahan | a. Jumlah Aparat Pemerintah Kalurahan: | | |
| | | 1) PNS | 0 | 0 |
| | | 2) Non PNS | 24 | 25 |
| | | b. Jumlah Anggota Bamuskal | 7 | 9 |
| | | c. Musyawarah Kalurahan | 2 | 2 |
| | | d. Musrenbang Kalurahan | 1 | 1 |
| | | e. Musyawarah Bamuskal | 12 | 12 |
| 5. | Ketentraman dan Ketertiban | a. Pembinaan Linmas | | |
| | | 1) Jumlah Anggota | 28 | 28 |
| | | 2) Alat Pemadam Kebakaran | 0 | 0 |
| | | 3) Jumlah Hansip Terlatih | 28 | 28 |
| | | b. Ketentraman dan Ketertiban | | |
| | | 1) Jumlah Kejadian Kriminal | 0 | 0 |
| | | 2) Jumlah Bencana Alam | 0 | 0 |
| | | 3) Jumlah Operasi Penertiban | 0 | 0 |
| | | 4) Jumlah Pos Keamanan | 14 | 14 |
| | | 5) Jumlah Kecelakaan Remaja | 0 | 0 |
| 6. | Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan | a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan: | | |
| | | 1) RT/RW | Ada | Ada |
| | | 2) PKK | Ada | Ada |
| | | 3) Karang Taruna | Ada | Ada |
| | | 4) Pos Pelayanan Terpadu | Ada | Ada |
| | | 5) LPM | Ada | Ada |
| | | b. Lembaga Kemasyarakatan membantu Pemerintah Kalurahan dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat | Ada | Ada |

| | | | | |
|--|--|---|--------------|-----------|
| | | c. Lembaga Kemasyarakatan sebagai Wadah Partisipasi Masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah | Ada | Ada |
| | | d. Lembaga Kemasyarakatan diikutsertakan dalam pelaksanaan program sektoral dan program Pemerintah Daerah | Ada | Ada |
| | | e. Lembaga Adat | Ada | Ada |
| | | f. Lembaga adat dibentuk dengan Peraturan Kalurahan terpisah dengan lembaga kemasyarakatan | Tidak Ada | Tidak Ada |

B. Rencana Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Tahun Anggaran 2024

Adapun rencana program kerja bidang penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan Beji tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut.

1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
5. Penyediaan Tunjangan BPD
6. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)
7. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
8. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
9. Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintah Desa
10. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
11. Pengadaan peralatan kerja
12. Pengadaan Mebel
13. Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
14. Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja
15. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)
16. Penyusunan monografi desa
17. Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin
18. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
19. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
20. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
21. Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa

22. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)
23. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
24. Pengembangan Sistem Informasi Desa
25. Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran
26. Pengisian Perangkat Desa
27. Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam
28. Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan
29. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
30. Lin-lain Sub Bidang Pertanahan

C. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Tahun Anggaran 2024

Adapun Pelaksanaan Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut.

1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
5. Penyediaan Tunjangan BPD
6. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)
7. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
8. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
9. Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintah Desa
10. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
11. Pengadaan peralatan kerja
12. Pengadaan Mebel
13. Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
14. Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja
15. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)
16. Penyusunan monografi desa
17. Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin
18. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
19. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
20. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
21. Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
22. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)
23. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
24. Pengembangan Sistem Informasi Desa

25. Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran
26. Pengisian Perangkat Desa
27. Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam
28. Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan
29. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
30. Lin-lain Sub Bidang Pertanahan

BAB III

PROGRAM KERJA DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

A. Gambaran Umum Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan

| No | Sub Bidang | Kegiatan | Jumlah/Ada/Tidak Ada - Ya/Tidak Ada | |
|----------|------------------------|--|--|----------|
| | | | 2023 | 2024 |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| 1 | Sarana dan Prasarana | a. Jalan Kalurahan (Km) | 0,1 | 0,258 |
| | | b. Jalan Kabupaten/Kota (Km) | 0,05 | 0,12 |
| | | c. Jalan Provinsi (Km) | 0 | 0 |
| | | d. Jalan Negara (Km) | 0 | 0 |
| | | e. Jembatan (Buah) | 0 | 0 |
| | | f. Kantor Lurah (Ada/Tidak) | 0 | 0 |
| 2 | Pembangunan Pendidikan | a. Tempat Pendidikan Pendidikan Umum | | |
| | | 1) Kelompok Bermain (Jumlah) | 0 | 0 |
| | | 2) Taman Kanak-Kanak (Jumlah) | 0 | 0 |
| | | 3) Sekolah Dasar (Jumlah) | 0 | 0 |
| | | 4) Sekolah Menengah (Jumlah) | 0 | 0 |
| | | 5) Akademi (Jumlah) | 0 | 0 |
| | | 6) Institut/Sekolah Tinggi (Jumlah) | 0 | 0 |
| | | b. Tempat Pendidikan Khusus | | |
| | | 1) Pendidikan Pesantren (Jumlah) | 0 | 0 |
| | | 2) Madrasah (Jumlah) | 0 | 0 |
| | | 3) Sekolah Luar Biasa (Jumlah) | 0 | 0 |
| | | 4) Balai Latihan Kerja (Jumlah) | 0 | 0 |
| | | 5) Kursus-Kursus (Jumlah) | 0 | 0 |
| 3. | Pembangunan Kesehatan | a. Rumah Sakit Umum Pemerintahan (Jumlah) | 0 | 0 |
| | | b. Rumah Sakit Umum Swasta (Jumlah) | 0 | 0 |
| | | c. Rumah Sakit Kusta (Jumlah) | 0 | 0 |
| | | d. Rumah Sakit Mata (Jumlah) | 0 | 0 |
| | | e. Rumah Sakit Jiwa (Jumlah) | 0 | 0 |
| | | f. Rumah Sakit Bersalin (Jumlah) | 0 | 0 |
| | | g. Rumah Bidan | 0 | 0 |
| | | h. Puskesmas (Jumlah) | 0 | 0 |

7. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang
8. Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa
9. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)
10. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)
11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll
12. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
13. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
14. Pembinaan kelompok pelestari lingkungan hidup di desa
15. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)
16. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
17. Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata

C. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan Tahun Anggaran 2024

Adapun Pelaksanaan Program Kerja Bidang Penyelenggaraan pembangunan Kalurahan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut.

1. Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
2. Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
3. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)
4. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)
5. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
6. Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)
7. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang
8. Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa
9. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)
10. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)
11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll
12. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
13. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
14. Pembinaan kelompok pelestari lingkungan hidup di desa
15. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)
16. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
17. Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata

BAB III
PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

A. Gambaran Umum Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan

| No | Sub Bidang | Kegiatan | Jumlah/Ada/Tidak Ada - Ya/Tidak Ada | |
|----------|--|--|--|----------|
| | | | 2023 | 2024 |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| 1 | Sosialisasi Produk Hukum Kalurahan | a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Kalurahan: 1) Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Kalurahan | Tidak Ada | Ada |
| | | 2) Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 | Tidak Ada | Ada |
| | | 3) Peraturan Menteri mengenai Kalurahan | Ada | Ada |
| | | b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah 1) Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Kalurahan | Ada | Ada |
| | | 2) Sosialisasi Peraturan Bupati Tentang Kalurahan | Ada | Ada |
| | | c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Kalurahan 1) Sosialisasi Peraturan Kalurahan | Ada | Ada |
| | | 2) Sosialisasi Peraturan Lurah | Ada | Ada |
| | | 3) Sosialisasi Peraturan Bersama Lurah | Tidak Ada | Ada |
| 2. | Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat | a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat | Tidak Ada | Ada |
| | | b. Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah | Ada | Ada |
| | | c. Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil | Ya | Ya |
| | | d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan | Ya | Ya |

| | | | | |
|----|--------------------------|---|-----------|-----------|
| | | ketentraman dan ketertiban | | |
| | | e. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Kalurahan | Ya | Ya |
| 3. | Sosial Budaya Masyarakat | a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama | Ada | Ada |
| | | b. Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kesenian | Ada | Ada |
| | | c. Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat | Ada | Ada |
| | | d. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup | Ada | Ada |
| | | e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal | Ada | Ada |
| | | f. Sosialisasi mengenai ketenagakerjaan | Tidak Ada | Tidak Ada |
| 4. | Sosial Keagamaan | a. Majelis Taklim | Ada | Ada |
| | | b. Majelis Gereja | Ada | Ada |
| | | c. Majelis Hindu | Ada | Ada |
| | | d. Remaja Masjid | Ada | Ada |
| | | e. Remaja Gereja | Ada | Ada |
| | | f. Remaja Budha | Tidak Ada | Tidak Ada |
| | | g. Remaja Hindu | Ada | Ada |
| 5. | Ketenagakerjaan | a. Penyalur pembantu rumah tangga | Tidak Ada | Tidak Ada |
| | | b. Penampung Pekerja ke luar negeri | Tidak Ada | Tidak Ada |

B. Rencana Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan Tahun Anggaran 2024

Adapun rencana program kerja bidang pembinaan kemasyarakatan Kalurahan Beji tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut.

1. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
2. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
3. Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)
4. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
5. Pengembangan kehidupan sosial keagamaan

6. Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya
7. Operasional Karang Taruna
8. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
9. Pembinaan PKK
10. Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)

C. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan Tahun Anggaran 2024

Adapun Pelaksanaan Program Kerja Bidang pembinaan kemasyarakatan Kalurahan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut.

1. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
2. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
3. Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)
4. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
5. Pengembangan kehidupan sosial keagamaan
6. Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya
7. Operasional Karang Taruna
8. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
9. Pembinaan PKK
10. Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)

BAB V
PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A. Gambaran Umum Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan

| No | Sub Bidang | Kegiatan | Jumlah/Ada/Tidak Ada - Ya/Tidak Ada | |
|----------|-------------------------------------|-------------------------------|--|-----------|
| | | | 2023 | 2024 |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| 1. | Sosialisasi dan motivasi masyarakat | a. Bidang Sosial Budaya | Ada | Ada |
| | | b. Bidang Ekonomi | Ada | Ada |
| | | c. Bidang Politik | Tidak Ada | Tidak Ada |
| | | d. Bidang Lingkungan Hidup | Ada | Ada |
| 2. | Pemberdayaan Masyarakat | a. Pemberdayaan Keluarga | Ada | Ada |
| | | b. Pemberdayaan Pemuda | Ada | Ada |
| | | c. Pemberdayaan Olah Raga | Tidak Ada | Tidak Ada |
| | | d. Pemberdayaan Karang Taruna | Tidak Ada | Tidak Ada |
| 3. | Penggalangan Partisipasi Masyarakat | a. Bidang Pendidikan | Tidak Ada | Tidak Ada |
| | | b. Bidang Kesehatan | Ada | Ada |

B. Rencana Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Tahun Anggaran 2024

Adapun rencana program kerja bidang pemberdayaan masyarakat Kalurahan Beji tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut.

1. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)
2. Pembinaan/Pemberdayaan Kelompok Tani/Gapoktan
3. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
4. Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa
5. Peningkatan Kapasitas BPD
6. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
7. Penyelenggaraan Desa Layak Anak (Delana)
8. Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM
9. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
10. Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)
11. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)

C. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Tahun Anggaran 2024

Adapun Pelaksanaan Program Kerja Bidang pemberdayaan masyarakat Kalurahan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut.

1. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)
2. Pembinaan/Pemberdayaan Kelompok Tani/Gapoktan
3. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
4. Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa
5. Peningkatan Kapasitas BPD
6. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
7. Penyelenggaraan Desa Layak Anak (Delana)
8. Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM
9. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
10. Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)
11. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)

BAB VI

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

A. Rincian APB Kalurahan Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Kalurahan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024, secara umum APB Kalurahan Beji Tahun Anggaran 2024 adalah terdiri dari :

| | | |
|--|----|------------------|
| 1. Pendapatan Desa | | |
| a. Semula | Rp | 3.474.310.200,00 |
| b. bertambah/(berkurang) | Rp | 226.318.000,00 |
| Jumlah pendapatan setelah perubahan | Rp | 3.700.628.200,00 |
| 2. Belanja Kalurahan | | |
| a. Semula | Rp | 3.525.685.000,00 |
| b. bertambah/(berkurang) | Rp | 228.199.554,00 |
| Jumlah belanja setelah perubahan | Rp | 3.753.884.867,00 |
| Surplus/ (Defisit) setelah perubahan | Rp | (53.256.667,00) |
| 3. Pembiayaan | | |
| 3.1. Penerimaan Pembiayaan | | |
| a. Semula | Rp | 56.375.112,20 |
| b. bertambah/(berkurang) | Rp | 1.881.554,80 |
| Jumlah penerimaan setelah perubahan | Rp | 58.256.667,00 |
| 3.2. Pengeluaran Pembiayaan | | |
| a. Semula | Rp | 5.000.000,00 |
| b. bertambah/(berkurang) | Rp | 0,00 |
| Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a-b) | Rp | 53.256.667,00 |
| SiLPA Tahun Berkenaan setelah perubahan | Rp | 0,00 |

Rincian APB Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

B. Rincian Realisasi APB Kalurahan Tahun Anggaran 2024

Berdasarkan Peraturan Kalurahan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran dan Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 terdiri dari :

| | Ref | Anggaran | Realisasi | (Lebih)/ kurang |
|--|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| PENDAPATAN | | | | |
| Pendapatan Asli Desa | C.2 | Rp. 30,780,000.00 | Rp. 19,590,000.00 | Rp. 11,190,000.00 |
| Pendapatan Transfer | | Rp. 3,591,334,200.00 | Rp. 3,554,019,290.00 | Rp. 37,314,910.00 |
| Dana Desa | C.3 | Rp. 1,277,233,000.00 | Rp. 1,277,233,000.00 | Rp. - |
| Bagian dr hasil pajak dan Retribusi Daerah | C.4 | Rp. 78,742,100.00 | Rp. 78,658,100.00 | Rp. 84,000.00 |
| Alokasi Dana Desa | C.5 | Rp. 960,759,100.00 | Rp. 954,400,400.00 | Rp. 6,358,700.00 |
| Bantuan Keuangan Propinsi | C.6 | Rp. 1,250,000,000.00 | Rp. 1,219,127,790.00 | Rp. 30,872,210.00 |
| Bantuan Keuangan Kabupaten/kota | C.7 | Rp. 24,600,000.00 | Rp. 24,600,000.00 | Rp. - |
| Pendapatan Lain lain | C.8 | Rp. 78,514,000.00 | Rp. 71,114,896.00 | Rp. 7,399,104.00 |
| JUMLAH PENDAPATAN | | Rp. 3,700,628,200.00 | Rp. 3,644,724,186.00 | Rp. 55,904,014.00 |
| BELANJA | | | | |
| Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | C.9 dan C15 | Rp. 1,265,867,806.00 | Rp. 1,166,487,896.00 | Rp. 99,379,910.00 |
| Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | C.10 dan C15 | Rp. 1,484,282,000.00 | Rp. 1,460,570,790.00 | Rp. 23,711,210.00 |
| Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | C.11 dan C15 | Rp. 329,218,261.00 | Rp. 308,992,261.00 | Rp. 20,226,000.00 |
| Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | C.12 dan C15 | Rp. 592,247,300.00 | Rp. 559,994,300.00 | Rp. 32,253,000.00 |
| Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa | C.13 dan C15 | Rp. 82,269,500.00 | Rp. 71,032,000.00 | Rp. 11,237,500.00 |
| JUMLAH BELANJA | C.14 | Rp. 3,753,884,867.00 | Rp. 3,567,077,247.00 | Rp. 186,807,620.00 |
| SURPLUS/(DEFISIT) | | Rp. (53,256,667.00) | Rp. 77,646,939.00 | Rp. (130,903,606.00) |
| PEMBIAYAAN | | | | |
| Penerimaan Pembiayaan | C.15 | Rp. 58,256,667.00 | Rp. 58,256,667.00 | Rp. - |
| Pengeluaran Pembiayaan | | Rp. 5,000,000.00 | Rp. - | Rp. 5,000,000.00 |
| PEMBIAYAAN NETTO | | Rp. 53,256,667.00 | Rp. 58,256,667.00 | Rp. (5,000,000.00) |
| SILPA TAHUN BERJALAN | | Rp. - | Rp. 135,903,606.00 | Rp. (135,903,606.00) |

Rincian Realisasi APB Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

BAB VII

KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan

1. Keberhasilan Yang Dicapai

Keberhasilan yang telah dicapai pada bidang penyelenggaraan pemerintah kalurahan telah tercapai 97,54% hal ini didasarkan pada penggunaan dan pelaksanaan kegiatan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

2. Permasalahan

Salah satu faktor utama yang menyebabkan penurunan realisasi ini adalah mundurnya timeline pengisian perangkat desa. Hal ini menyebabkan anggaran yang telah dialokasikan untuk penghasilan tetap (Siltap) perangkat desa tidak terserap sepenuhnya karena jumlah perangkat yang menerima Siltap berkurang dari jumlah yang direncanakan. Meskipun pencairan Siltap tetap berjalan, total realisasi anggaran mengalami penurunan karena tidak seluruh pos anggaran untuk Siltap digunakan.

Selain itu, kegiatan profil desa belum terlaksana secara maksimal karena belum dilakukan pendataan langsung di lapangan. Hal ini mengakibatkan sebagian anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut tidak terserap, turut berkontribusi terhadap penurunan realisasi anggaran di Bidang Pemerintahan.

3. Upaya Yang Ditempuh

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan program dan meningkatkan realisasi anggaran di Bidang Pemerintahan pada tahun mendatang, berbagai langkah strategis akan diterapkan. Salah satu upaya utama adalah menyesuaikan jadwal pengisian perangkat desa agar dapat dilakukan lebih awal, sehingga alokasi anggaran Penghasilan Tetap (Siltap) dapat terserap secara optimal. Selain itu, koordinasi dengan pihak terkait akan lebih ditingkatkan guna memastikan kelancaran proses pengisian perangkat desa.

Di sisi lain, efektivitas pelaksanaan kegiatan profil desa juga akan ditingkatkan dengan menyusun jadwal pendataan lapangan yang lebih terstruktur dan memastikan pelaksanaannya tepat waktu. Sumber daya yang tersedia akan dioptimalkan untuk mempercepat proses pendataan sehingga kegiatan ini dapat berjalan lebih maksimal.

Selain itu, evaluasi dan monitoring akan dilakukan secara lebih ketat dengan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan kegiatan agar kendala dapat diidentifikasi lebih awal dan segera diatasi. Setiap program akan disusun dengan timeline yang lebih realistis agar dapat dijalankan sesuai rencana. Untuk mendukung hal tersebut, koordinasi dan sinergi antar pihak juga akan diperkuat dengan meningkatkan komunikasi antara pemerintah desa, kecamatan, serta instansi terkait. Rapat koordinasi rutin akan diadakan guna mengevaluasi progres kegiatan dan mencari solusi terhadap kendala yang mungkin muncul.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pelaksanaan Bidang Pemerintahan pada tahun mendatang dapat berjalan lebih optimal, meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

1. Keberhasilan Yang Dicapai

Keberhasilan yang telah dicapai pada bidang pelaksanaan pembangunan telah tercapai 98,40% hal ini didasarkan pada penggunaan dan pelaksanaan kegiatan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

2. Permasalahan

Pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang Pembangunan telah berhasil direalisasikan sepenuhnya sesuai dengan perencanaan. Meskipun seluruh kegiatan terlaksana, masih terdapat beberapa permasalahan yang muncul selama proses pelaksanaan yang perlu menjadi perhatian untuk perbaikan di masa mendatang.

Salah satu kendala utama adalah kualitas hasil pekerjaan yang masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal ketepatan waktu dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Beberapa pekerjaan mengalami tantangan teknis di lapangan yang menyebabkan adanya penyesuaian dalam metode pelaksanaan. Selain itu, faktor cuaca dan kondisi alam juga menjadi tantangan, terutama pada pekerjaan fisik yang memerlukan kondisi tertentu agar hasilnya optimal.

Di samping itu, partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan masih perlu ditingkatkan, baik dalam hal pengawasan maupun keterlibatan dalam pemanfaatan hasil pembangunan. Dalam beberapa kasus, keterlambatan distribusi material atau peralatan juga sempat menjadi kendala, meskipun akhirnya dapat diatasi sehingga tidak menghambat penyelesaian kegiatan.

Dengan adanya evaluasi terhadap berbagai permasalahan ini, diharapkan pelaksanaan program Bidang Pembangunan di tahun mendatang dapat lebih optimal, dengan hasil yang lebih berkualitas dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

3. Upaya Yang Ditempuh

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Bidang Pembangunan di tahun mendatang, berbagai langkah strategis akan ditempuh guna mengatasi permasalahan yang muncul. Salah satu upaya utama adalah meningkatkan pengawasan terhadap kualitas hasil pekerjaan, baik dari segi ketepatan waktu maupun kesesuaian dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilakukan dengan memperketat monitoring di setiap tahap pelaksanaan serta memastikan adanya evaluasi berkala terhadap progres pembangunan.

Selain itu, antisipasi terhadap faktor cuaca dan kondisi alam akan ditingkatkan dengan perencanaan yang lebih fleksibel dan penyusunan jadwal kerja yang mempertimbangkan potensi hambatan di lapangan. Penyediaan material dan peralatan juga akan dioptimalkan

melalui koordinasi yang lebih baik dengan penyedia barang dan jasa, sehingga keterlambatan distribusi dapat diminimalkan.

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan juga akan didorong lebih aktif, baik dalam pengawasan maupun pemanfaatan hasil pembangunan. Sosialisasi dan pelibatan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan akan diperkuat agar pembangunan lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan warga.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pelaksanaan Bidang Pembangunan di tahun mendatang dapat berjalan lebih efektif, dengan hasil yang lebih berkualitas dan memberikan manfaat yang lebih maksimal bagi masyarakat.

C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

1. Keberhasilan Yang Dicapai

Keberhasilan yang telah dicapai pada bidang pelaksanaan pembangunan telah tercapai 93,86% hal ini didasarkan pada penggunaan dan pelaksanaan kegiatan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

2. Permasalahan

Pelaksanaan kegiatan di bidang ini tidak memiliki permasalahan yang berarti.

3. Upaya Yang Ditempuh

Penataan dan pengorganisasian pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan matriks atau dokumen pelaksanaan anggaran.

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Keberhasilan Yang Dicapai

Kerhasilan yang telah dicapai pada bidang pelaksanaan pembangunan telah tercapai 94,55% hal ini didasarkan pada penggunaan dan pelaksanaan kegiatan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

2. Permasalahan

Pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat masih menghadapi beberapa kendala, khususnya terkait kegiatan yang tidak terlaksana sesuai rencana. Beberapa kegiatan yang belum dapat direalisasikan antara lain Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan, Penyelenggaraan Desa Layak Anak (Delana), serta Pelatihan Pengelolaan BUM Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Salah satu penyebab utama tidak terlaksananya kegiatan tersebut adalah keterbatasan waktu dan jadwal yang padat, sehingga pelaksanaan kegiatan yang bersifat pelatihan dan penyuluhan menjadi terhambat. Selain itu, koordinasi dengan pihak terkait belum optimal, baik dalam hal kesiapan narasumber maupun peserta, yang berdampak pada sulitnya menentukan waktu pelaksanaan yang sesuai.

Faktor lainnya adalah prioritas anggaran dan sumber daya, di mana beberapa kegiatan lebih difokuskan pada program lain yang dianggap lebih mendesak, sehingga pelaksanaan

kegiatan pelatihan dan penyuluhan mengalami penundaan. Kurangnya minat atau kesiapan dari kelompok sasaran dalam mengikuti kegiatan juga turut menjadi tantangan yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan di masa mendatang.

3. Upaya Yang Ditempuh

Untuk memastikan kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan, Penyelenggaraan Desa Layak Anak (Delana), serta Pelatihan Pengelolaan BUM Desa dapat terlaksana di tahun mendatang, beberapa langkah strategis akan ditempuh.

Salah satu upaya utama adalah menyusun perencanaan yang lebih terstruktur dan realistis, dengan menetapkan jadwal pelaksanaan yang lebih awal agar tidak berbenturan dengan kegiatan lain. Selain itu, koordinasi dengan pihak terkait, seperti narasumber, peserta, serta lembaga pendukung, akan lebih ditingkatkan agar persiapan dapat dilakukan dengan matang.

Dalam hal penganggaran, akan dilakukan optimalisasi alokasi dana dan sumber daya, dengan memastikan bahwa kegiatan pelatihan dan penyuluhan tetap menjadi prioritas tanpa mengganggu program lain yang mendesak. Selain itu, metode pelaksanaan kegiatan akan lebih fleksibel, misalnya dengan menyesuaikan format pelatihan agar lebih menarik dan sesuai dengan kebutuhan peserta.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, akan dilakukan sosialisasi lebih awal dan lebih intensif, sehingga kelompok sasaran memahami manfaat kegiatan tersebut dan lebih termotivasi untuk mengikuti pelatihan. Selain itu, evaluasi terhadap program serupa di tahun sebelumnya akan menjadi dasar dalam menyusun strategi pelaksanaan yang lebih efektif dan efisien.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan seluruh kegiatan yang tertunda dapat terlaksana dengan baik di tahun mendatang, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan meningkatkan kualitas pemberdayaan di tingkat desa.

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan ini dibuat untuk menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan di Kalurahan Beji Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul.

Semoga segala bentuk harapan dan strategi arah Pembangunan Kalurahan Beji ini dapat menjadikan Pemerataan dalam membangun manusia dan membangun sarana prasarana aktifitas sosial, ekonomi sehingga diharapkan terwujudnya pembangunan yang adil dan merata menuju kesejahteraan bagi seluruh komponen masyarakat Kalurahan Beji.

Laporan penyelenggaraan pemerintah kalurahan ini masih belum sempurna, diharapkan masukan dari berbagai kalangan dalam rangka perbaikan untuk tahun berikutnya.

Beji, 11 Maret 2025

Lurah Beji

TTD

Sri Idhayanti

Lampiran III Rekapitulasi jumlah penduduk akhir Desember 2024

REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK KALURAHAN BEJI
KAPANEWON NGAWEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PER 31 DESEMBER 2024

| NO | PADUKUHAN | JUMLAH (jiwa) | | JUMLAH (jiwa) |
|----|---------------|---------------|-----------|------------------|
| | | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |
| 1 | TEGALREJO | 305 | 305 | 610 |
| 2 | BENDO | 232 | 232 | 464 |
| 3 | BANARAN | 169 | 145 | 314 |
| 4 | BEJONO | 186 | 179 | 365 |
| 5 | GROJOGAN | 137 | 133 | 270 |
| 6 | DAGURAN LOR | 209 | 213 | 422 |
| 7 | DAGURAN KIDUL | 135 | 156 | 291 |
| 8 | TUNGKLUK | 123 | 138 | 261 |
| 9 | DUREN | 153 | 156 | 309 |
| 10 | SIDOREJO | 104 | 100 | 204 |
| 11 | SERUT | 70 | 63 | 133 |
| 12 | BEJI | 103 | 105 | 208 |
| 13 | NGELO LOR | 128 | 125 | 253 |
| 14 | NGELO KIDUL | 103 | 114 | 217 |
| | JUMLAH TOTAL | 2.166 | 2.172 | 4.338 |

LURAH BEJI

SRI IDHAYANTI